

Siaran Pers

MENTERI BAMBANG:

FORUM KONSULTASI PUBLIK BISA DITULARKAN HINGGA KE DAERAH

Jakarta, 22 Maret 2018 – Menteri PPN/Kepala Bappenas yang juga ahli ekonomi pembangunan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan dalam era demokrasi Forum Konsultasi Publik (FKP) sudah bukan lagi suatu opsi melainkan suatu keharusan yang sangat perlu diadakan. Menteri Bappenas berharap FKP bisa ditularkan hingga ke daerah yang bisa dilaksanakan oleh Bappeda maupun pimpinan daerah. Bappeda, kata Bambang, bisa memfasilitasi jika konteksnya perencanaan, sementara untuk pimpinan daerah lebih ke masalah pelayanan. Bentuknya bisa seperti *town hall meeting* atau *public consultations* yang akan menjadi menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. “Seharusnya setiap pemerintahan daerah punya konsep *town hall meeting* atau *public consultations* yang bisa menjadi forum pertemuan langsung antara pimpinan daerah dengan masyarakat,” demikian dikatakan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro dalam acara **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2019**, di Ruang Rapat Benny S. Muljana, Gedung Widjojo Nitisastro, Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (21/93).

Dalam kegiatan yang dihadiri sekitar 110 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lintas sektor dan 55 perguruan tinggi, Menteri Bambang menjelaskan FKP merupakan kegiatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) khususnya pasal 2 ayat (4) yang menyebutkan bahwa SPPN bertujuan untuk mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat dan mengoptimalkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang terkait dalam proses penyusunan rencana pembangunan, salah satunya adalah Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Sejak 2011, pelaksanaan konsultasi publik sebagai salah satu proses teknokratik bagi penyusunan dokumen perencanaan sudah dilakukan dan akan terus dilakukan.

Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa tujuan FKP hari ini adalah untuk mengkomunikasikan Rancangan Awal RKP Tahun 2019 kepada pemangku kepentingan khususnya Perguruan Tinggi dan OMS, sehingga dapat memperoleh masukan. Dengan begitu, diharapkan RKP Tahun 2019 dapat lebih tajam dan dapat mencapai target-target pembangunan jangka menengah nasional. “Tujuan dari FKP ini adalah untuk mengkomunikasikan Rancangan Awal RKP Tahun 2019, sekaligus untuk mendengarkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan pembangunan, khususnya unsur masyarakat yang diwakili kalangan Perguruan Tinggi dan OMS. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan sekaligus tahun penutup bagi Kabinet Kerja dalam mengupayakan pencapaian visi pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN. Oleh karena itu, penyusunan RKP Tahun 2019 harus lebih cermat dan terintegrasi, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Indonesia secara tepat dan strategis,” jelas Menteri Bambang.

Di akhir sambutannya, Menteri Bambang berharap FKP ini dapat menghimpun masukan dan kritik konstruktif dari para pemangku kepentingan Perguruan Tinggi dan OMS untuk menyempurnakan Rancangan Awal RKP Tahun 2019. “Kita sadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional merupakan keberhasilan kolektif dari peran pemerintah bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat dari berbagai lapisan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan perencanaan yang efektif dan strategis,

sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan dinamika dalam masyarakat. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan bekerja bersama secara sinergis untuk mewujudkan pembangunan nasional Indonesia tercinta ini," pungkaskan Menteri Bambang.

Jakarta, 22 Maret 2018

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas
Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650
Faksimile: (021) 31901154
e-mail: humas@bappenas.go.id